

**PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KORUPSI**  
**(Studi Fenomenologi Pada Narapidana Korupsi Di Lembaga**  
**Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
**Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh**  
**Gelar Sarjana Strata Psikologi**

**Disusun oleh :**

Realita Ningrum Faizah

15710099

**Dosen Pembimbing :**

Very Julianto, S.Psi., M.Psi., Psikolog

NIP. 19880717 201503 1 003

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2019**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-291/Un.02/DSH/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : **PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KORUPSI (Studi Fenomenologi Pada Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REALITA NINGRUM FAIZAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 15710099  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Juli 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Very Julianto, M.Psi.

NIP. 19880717 201503 1 003

Penguji I

Penguji II

*Nuristighfari*

Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi  
NIP. 19761028 200912 2 001

*Mayreyna*

Mayreyna Nurwardani, S.Psi., M.Psi  
NIP. 19810505 200901 2 011

Yogyakarta, 25 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Dekan

*M. Sodik*  
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004



## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Realita Ningrum Faizah

NIM : 15710099

Program Studi : Psikologi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini adalah hasil karya peneliti sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi. Skripsi ini adalah hasil karya atau penelitian sendiri, bukan plagiasi dari karya lain atau penelitian orang lain. Dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari dalam skripsi saya ditemukan bentuk plagiasi karya orang lain, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 Juni 2019

Yang menyatakan



Realita Ningrum Faizah

NIM. 15710099

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing, saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Realita Ningrum Faizah

NIM : 15710099

Prodi : Psikologi

Judul : Proses Pengambilan Kepuusan Korupsi (Studi Fenomenologi Pada Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Psikologi.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah. Demikian atas perhatiannya terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 24 Juni 2019

Pembimbing



Very Julianto, S.Psi., M.Psi., Psikolog

NIP. 19880717 201503 1 003

## MOTTO

“Because there is no guarantee that this life is easy“

~Miley Cirrus~

“Have patience with all things, but chiefly have patience with  
yourself“

~Saint Francis de Sales~

“Jangan berharap dunia yang berubah, tapi diri kita lah yang harus berubah. Ingat, anak-anakku, Allah berfirman, Dia tidak akan mengubah nasib sebuah kaum, sampai kaum itu sendirilah yang melakukan perubahan. Kalau kalian mau sesuatu dan ingin menjadi sesuatu, jangan hanya bermimpi dan berdoa, tapi berbuatlah, berubahlah, lakukan saat ini. Sekarang juga!”

~Ahmad Fuadi~

“Hanya karena cerita kita berbeda dengan cerita orang lain, bukan berarti kita tidak bisa sama bahagianya”

~Ahimsa Azaleav~

“Jika kita sehat, maka sungguh, kita telah memiliki nikmat besar tiada tara. Jika kita santai, punya waktu luang, lagi-lagi, kita telah memiliki nikmat besar dari Tuhan. Dua hal ini, sehat dan waktu luang adalah dua nikmat luar biasa. Sayangnya, kita baru menyadarinya saat dua hal ini pergi meninggalkan kita. Saat itulah kita baru melihat ke belakang, betapa besar nikmat tersebut”

~Tere Liye~

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

*Bismillaahirrohmaanirraahiim*

**Karya sederhana ini saya persembahkan kepada :**

Allah SWT yang selalu berada di dalam hati saya kapanpun dan dimanapun, yang selalu memahami segala perasaan suka duka saya tanpa saya bercerita, yang menunjukkan kasih sayangNya dalam segala bentuk nikmat duniawi maupun ujian kehidupan, serta yang tidak pernah lelah mengingatkan saya menuntun saya menuju jalan kebaikan yang diridhoiNya.

Bapak dan Ibu tercinta (Bambang Winarto dan Sa'adah), Kakak-Kakak terbaik (Mas Iful, Mbak Rina, Mas Wajid, dan Mas Achyar), serta Keponakan-Keponakan tersayang (Fahri dan Zaskia) motivasi terbesar yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang yang begitu besar, nasihat, semangat, dan dukungan materil maupun moril dalam keadaan apapun baik suka maupun duka.

Serta, teruntuk Almamater tercinta “Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.

## INTISARI

### PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KORUPSI (Studi Fenomenologi Pada Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta)

**Realita Ningrum Faizah**

**15710099**

Fenomena korupsi semakin berkembang dan menjadi perhatian khusus masyarakat. Persebaran budaya korupsi yang terjadi di Indonesia seperti mata rantai yang sulit diputuskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan korupsi, faktor penyebab munculnya korupsi, pandangan terhadap korupsi, dan rasa bersalah pasca korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan pada lima narapidana korupsi laki-laki di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta. Hasil penelitian ini mengungkapkan bagaimana proses pengambilan keputusan korupsi. Informan pertama bermasalah dalam membayar kredit pesawat dengan bank pemerintah. Informan kedua melakukan gratifikasi sumbangan pembangunan desa. Informan ketiga menerima gratifikasi dari informan kelima sisa dana proyek pengadaan tanah. Informan keempat membiarkan terjadinya gratifikasi antara masyarakat dan staf desa terkait proyek pensertifikatan tanah. Informan kelima melakukan korupsi dana proyek pengadaan tanah. Faktor-faktor penyebab munculnya korupsi yang paling besar adalah maraknya budaya gratifikasi, persaingan bisnis atau politik, ketidakpahaman terhadap aturan hukum terkait pelaksanaan jabatan, implementasi sistem yang masih kurang baik, dan ketidakpercayaan terhadap hukum. Pandangan kelima informan terhadap korupsi adalah tidak menyukai korupsi dan merasa menjadi pelaku korupsi sama dengan menjadi musuh negara. Hampir semua informan pada umumnya merasa bahwa dirinya tetap tidak bersalah pasca menjadi narapidana korupsi sekalipun.

*kata kunci: pengambilan keputusan, korupsi, rasa bersalah.*

## ***ABSTRACT***

### ***CORRUPTION DECISION MAKING PROCESS***

*(Phenomenology Study on Corruption Inmates at the Class II A Wirogunan Correctional Facilities in Yogyakarta)*

**Realita Ningrum Faizah**

**15710099**

*The phenomenon of corruption was growing and became a special concern of the community. The distribution of corruption in Indonesia was like a chain that was difficult to decided. This study aimed to determined the process of corruption decision making, the factors caused the emergence of corruption, views on corruption, and post-corruption guilt. This type of research was qualitative research with phenomenology methods. The data collection used the method of observation and interviews conducted on five male corruption inmates at the Class II A Wirogunan Correctional Facilities in Yogyakarta. The results of this study revealed how the corruption decision making process. The first informant had problem in paying plane credit with a government bank. The second informant gratified the contribution of village development. The third informant received gratuities from the fifth informant for the remaining funds for the land acquisition project. The fourth informant allowed the occurrence of gratification between the community and village staff regarding the land certification project. The fifth informant corrupted the land acquisition project funds. The biggest factors that caused corruption to emerged were the rampant culture of gratification, business or political competition, lack of understanding of the rule of law regarding the implementation of positions, poor implementation of the system, and mistrust of the law. The informants' fifth view of corruption was that they dislike corruption and feel that being perpetrators of corruption was the same as being an enemy of the state. Almost all informants felt that he remained innocent after even became a corruption convict.*

*keywords: decision making, corruption, guilty feeling.*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdullillahi Robbil ‘alamiin, puji syukur tiada henti peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan inayah-Nya. Sholawat serta salam peneliti curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang jalan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

Penelitian ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dorongan, dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala

kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang sudah ikut terlibat dan membantu dalam mewujudkan penyelesaian tugas akhir ini. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, P. h. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agung Supriyono, S.H. selaku Kepala Badan KESBANGPOL DIY.
3. Bapak Tedia Sukmana selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DIY.
4. Bapak Heriyanto selaku Kepala Seksi Binapi LP Klas II A Yogyakarta.
5. Ibu Kandi selalu humas dan pendamping peneliti selama melakukan penelitian di LP Klas II A Yogyakarta.

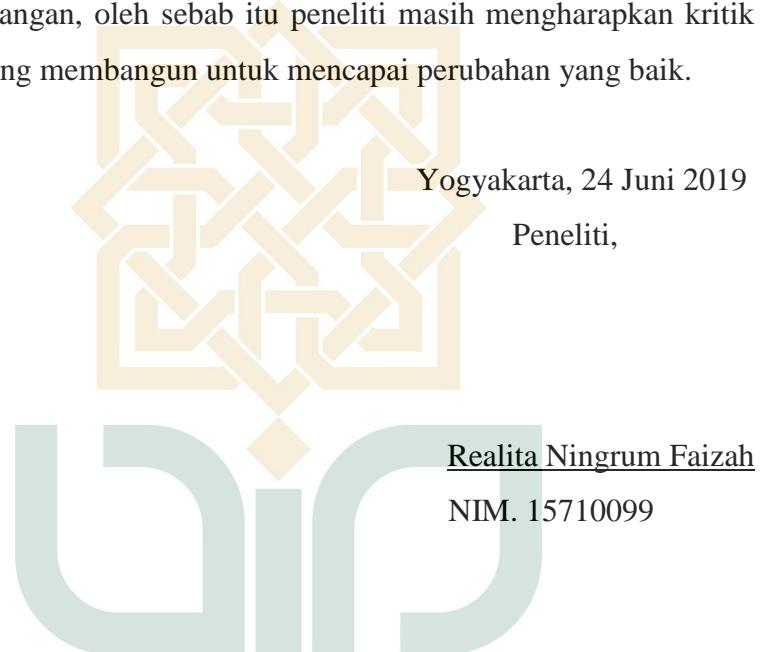
6. Bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Dr. Erika Kusumaputri, M.Si. selaku wakil Dekan Bidang I dan Bapak Dr. Sabaruddin, M.Si. selaku wakil Dekan Bidang II dan Ibu Dr. Sulistyaniingsih, M.Si sebagai wakil Dekan Bidang III.
8. Ibu Lisnawati, S.Psi., M. Psi. selaku Ketua Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ibu Raden Rachmy Diana, S.Psi., M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik yang tidak pernah lelah mengingatkan, melayani, dan memberikan motivasi dengan sabar, sehingga perkuliahan peneliti selama empat tahun dapat berjalan lancar.
10. Bapak Very Julianto, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, mencerahkan pikiran, memberikan arahan, memberikan dukungan, memberikan motivasi dan semangat, memberikan kritik, saran dan memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
11. Ibu Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi. selaku Dosen Penguji Skripsi I dan Ibu Mayreyna Nurwardani, S.Psi., M.Psi. selaku Dosen Penguji Skripsi II yang telah memberikan revisi perbaikan, arahan, masukan, dan ilmunya kepada peneliti untuk kesempurnaan skripsi ini.
12. Bapak Sukamto S.Sos., M.A. dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan pada peneliti di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.

13. Bapak, Ibu Dosen Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, atas segala kesempatan, ilmu pengetahuan, dan fasilitas yang telah diberikan.
14. Seluruh informan yang sudah bersedia membantu peneliti dengan memberikan informasi secara terbuka dan sukarela demi mendukung hasil penelitian ini. Terimakasih juga karena sudah cukup banyak meluangkan waktunya untuk peneliti di tengah-tengah segala rutinitas.
15. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Bambang Winarto dan Sa'adah yang selalu mendukungku melalui doa dan kasih sayangnya setiap saat. Serta kakak-kakakku terbaik Mas Iful, Mbak Rina, Mas Wajid, dan Mas Achyar yang selalu memotivasi dan selalu mendoakanku setiap saat. Tentunya tidak lupa juga dua ponakan krucil-krucilku Fahri dan Zaskia yang terkadang menjadi sumber tawaku di kala sedang lelah menghadapi semuanya.
16. Seseorang yang diam-diam secara tidak langsung menjadi sumber kekuatanku, motivasiku, dan figur positifku untuk cepat lulus menyelesaikan segala tanggung jawab akademis ini serta menyelesaikan apapun yang sudah kumulai sehingga dapat segera menyusulnya melanjutkan babak kehidupan berikutnya.
17. Teman DPSku M. Rapiq Hilal yang selalu memberikan kritik dan saran yang membangun, memberi segala bantuan kaitan dengan skripsi subjek, menjadi tempat sharing yang nyaman bagi peneliti selama ini. Terima kasih atas segala keikhlasannya dalam membantu peneliti serta menjadi *support system* satu DPS terbaik.
18. Teman-teman satu DPS ku Azmi, Sasa, Fahmi, dan Insani terima kasih telah memberi banyak pelajaran berharga dan menjadi tempat

mengeluarkan unek-unek ketika pikiran sedang benar-benar buntu. Terima kasih atas kebersamaan sampai sejauh ini.

19. Teman-temanku Mbak Ela, Mas Roni, Awanda, Azizy, Miftah, Pinkan, Rahma fifi, Difa, Lili, Sinta, dan Izzah yang sudah banyak memberikan informasi dan dukungan moril, serta bersedia direpotkan dalam segala keterbatasan peneliti.
20. Teman-teman psikologiku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tak bisa ku sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih untuk kalian semua yang telah memotivasku, membantuku, dan memberikan doa kepadaku selama menjalani proses perkuliahan di UIN.
21. Teman-temanku di PMII Humaniora Park, IRMAS Tempursari, dan IPNU IPPNU Ngawen yang pernah memberi banyak pelajaran *leadership* luar biasa di luar bangku perkuliahan.
22. Teman-temanku KKN Mbak Nazul, Ayuk, Putri, Diba, Mia, Latief, Lutfi, Mas Ali, dan Mas Andika yang pernah memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada peneliti selama bersama-sama.
23. Teman-temanku alumni IPA 1 dan IPA 2 MAN 2 Klaten yang masih berkenan menjalin silaturrahmi dan memberikan dukungan moril secara tidak langsung.
24. Semua sahabat-sahabatku dan teman- temanku dimanapun kalian berada, yang telah mendukung dan mendoakanku setiap saat meski dari kejauhan. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin saya bisa sebutkan satu-persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga Allah SWT membalas amal baik yang telah kalian berikan. Aamiin. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan atas izin-Nya. Namun peneliti tetap mengharapkan semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan khazanah psikologi pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Peneliti sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan, oleh sebab itu peneliti masih mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai perubahan yang baik.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Pengambilan Keputusan .....	20
1. Pengertian Pengambilan Keputusan .....	20
3. Tahapan-tahapan dalam Pengambilan Keputusan .....	22

4. Gaya-gaya Pengambilan Keputusan .....	25
5. Model-model dalam Pengambilan Keputusan .....	27
<b>B. Korupsi .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Korupsi .....	28
2. Jenis-Jenis Korupsi .....	30
3. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Korupsi.....	31
4. Dampak Korupsi .....	34
5. Rasa Bersalah Pasca Korupsi.....	35
<b>C. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>38</b>
<b>D. Pertanyaan Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Fokus Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	46
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
1. Subjek Penelitian .....	46
2. Objek Penelitian.....	48
E. Metode Pengumpulan Data .....	48
1. Wawancara.....	48
2. Observasi .....	49
F. Metode Analisis Data .....	50

1. Reduksi Data.....	51
2. Penyajian Data .....	51
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi .....	52
<b>G. Keabsahan Data .....</b>	<b>52</b>
1. Triangulasi dengan sumber .....	53
2. Triangulasi dengan metode .....	53
3. Triangulasi dengan teori .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
<b>A. Orientasi Kancah dan Persiapan Penelitian .....</b>	<b>55</b>
1. Orientasi Kancah.....	55
2. Persiapan Penelitian .....	56
<b>B. Pelaksanaan Penelitian .....</b>	<b>58</b>
<b>C. Laporan Hasil Penelitian .....</b>	<b>60</b>
1. Informan BA .....	60
2. Informan LW .....	77
3. Informan WR .....	99
4. Informan SA .....	115
5. Informan DA.....	132
<b>D. PEMBAHASAN.....</b>	<b>147</b>
<b>Bagan Proses Pengambilan Keputusan Korupsi (Kelima Informan).....</b>	<b>173</b>

Bagan Proses Pengambilan Keputusan Korupsi (Informan BA).....	174
Bagan Proses Pengambilan Keputusan Korupsi (Informan LW).....	175
Bagan Proses Pengambilan Keputusan Korupsi (Informan WR).....	176
Bagan Proses Pengambilan Keputusan Korupsi (Informan SA).....	177
Bagan Proses Pengambilan Keputusan Korupsi (Informan DA).....	178
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>179</b>
A. Kesimpulan .....	179
B. Saran .....	181
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>186</b>

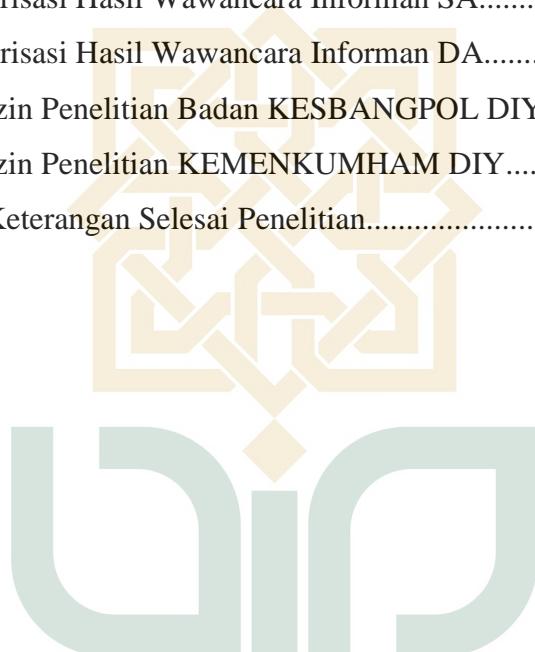


## DAFTAR TABEL

1. Data Diri Informan .....	56
2. Rincian proses pelaksanaan pengambilan data pada kelima informan.....	59
3. Bagan Proses Pengambilan Keputusan Korupsi.....	173
4. Bagan Proses Pengambilan Keputusan Korupsi (Informan BA).....	174
5. Bagan Proses Pengambilan Keputusan Korupsi (Informan LW).....	175
6. Bagan Proses Pengambilan Keputusan Korupsi (Informan WR).....	176
7. Bagan Proses Pengambilan Keputusan Korupsi (Informan SA).....	177
8. Bagan Proses Pengambilan Keputusan Korupsi (Informan DA).....	178

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Pertanyaan Wawancara .....192
2. Kategorisasi Hasil Wawancara Informan BA.....197
3. Kategorisasi Hasil Wawancara Informan LW.....213
4. Kategorisasi Hasil Wawancara Informan WR.....233
5. Kategorisasi Hasil Wawancara Informan SA.....246
6. Kategorisasi Hasil Wawancara Informan DA.....260
7. Surat Izin Penelitian Badan KESBANGPOL DIY.....273
8. Surat Izin Penelitian KEMENKUMHAM DIY.....274
9. Surat Keterangan Selesai Penelitian.....275



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Fenomena korupsi semakin berkembang dan menjadi perhatian khusus masyarakat khususnya di Indonesia. Persebaran budaya korupsi yang terjadi di seluruh dunia khususnya di Indonesia seperti mata rantai yang sulit diputuskan. Kasus korupsi yang sering diberitakan di berbagai media dan menjadi perhatian utama masyarakat luas kebanyakan hanya merupakan kasus korupsi para pejabat pemerintah, utamanya para anggota DPR/DPRD maupun kepala daerah. Kasus korupsi pada kenyataannya dapat terjadi di organisasi atau institusi atau lembaga manapun dari kelas bawah sampai kelas kakap. Kasus korupsi dapat terjadi di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Jumlah seluruh kerugian negara akibat maraknya kasus korupsi dapat dikatakan sangat banyak yang mencapai miliaran maupun triliunan rupiah.

Berdasarkan data laporan tahunan Badan Transparansi Internasional, Indonesia mendapat peringkat ke-96 bersama negara Brasil, Kolombia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia. Peringkat Indonesia ada di bawah Singapura (6), Brunei Darussalam (32), Malaysia (62), dan bahkan Timor Leste (91) untuk kawasan Asia Tenggara. Tranparansi Internasional sekaligus mengingatkan bahwa korupsi menjadi masalah global terus menerus. Transparansi menganggap bahwa banyak negara yang lamban dalam persoalan memerangi korupsi. Transparansi menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi 2017 juga mengungkapkan fakta sekaligus masalah selama ini "Meski banyak negara melakukan upaya memerangi korupsi, sebagian

besar negara terlalu lamban untuk bertindak," ujar Transparansi Internasional (<https://internasional.kompas.com/read/2018/02/26/14444501/indeks-persepsi-korupsi-2017-peringkat-indonesia-di-bawah-timor-leste> diakses pada 10 Oktober 2018).

Pelaku korupsi memiliki latar belakang profesi yang bermacam-macam. Laporan tren pelaku korupsi berdasarkan profesi sepanjang tahun 2015-2017 yang dikeluarkan ICW menunjukkan bahwa pegawai pemerintah daerah (pemda) masih menempati urutan teratas. *Indonesia Corruption Watch* menunjukkan bahwa 6 latar belakang profesi pelaku korupsi yang dapat teridentifikasi terbanyak melakukan korupsi pada tahun 2017 adalah 32,97 persen atau 456 terdakwa berlatar belakang pemda. Adapun 224 terdakwa (16,20 persen) berlatar belakang swasta, dan 94 terdakwa (6,80 persen) adalah kepala daerah. Sementara itu, 37 terdakwa (2,68 persen) berlatar belakang BUMN atau BUMD, 34 terdakwa (2,46 persen) berlatar belakang kampus, serta 33 terdakwa (2,39 persen) berlatar belakang anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD (<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/15133911/hingga-2017-terdakwa-korupsi-didominasi-pegawai-pemda> diakses pada 10 Oktober 2018).

Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang memiliki kesamaan dengan kejahatan lainnya dan sudah ada sejak manusia bersosialisasi satu sama lain di dunia ini (Hamzah, 2005). Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan, upaya memperkaya diri sendiri, dan bagian dari pelanggaran kode etik pejabat publik (Haboddin dan Rahman, 2013). Melakukan korupsi berarti menyalahgunakan kewenangan, menyimpang dari aturan hukum atau

norma dan menghancurkan kepercayaan. Korupsi adalah perilaku yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, dilakukan untuk memperoleh kepentingan pribadi maupun kelompok, melanggar hukum, menyimpang dari norma atau moral yang ada, dan dilakukan dalam lingkup lembaga publik atau pemerintahan maupun lingkup korporasi swasta (Abidin dan Siswadi, 2015). Marwan Mas dalam Rezki (2017) mengklarifikasi tujuh bentuk perbuatan korupsi yang diatur dalam 13 pasal UU Korupsi yaitu Kerugian Keuangan / Perekonomian Negara, Suap – Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan Gratifikasi/pemberian hadiah. Sujatmiko mengungkapkan gejala korupsi menurut ukurannya dibedakan sebagai *grand corruption* dan *petty corruption*, sedangkan menurut prosesnya gejala korupsi dibedakan sebagai *incidental, systematic, and systemic* (dalam Falah, 2014). Klitgaard mendefinisikan istilah korupsi yang didalamnya mengandung faktor-faktor penyebab korupsi, diantaranya kewenangan yang mudah disalahgunakan, monopoli ekonomi politik hukum, dan minimnya akuntabilitas karena integritas moral pemegang monopoli kekuasaan yang rendah (dalam Abidin dan Siswadi, 2015).

Penyebab-penyebab korupsi pada kenyataannya tidak sesederhana apa yang disebutkan oleh Klitgaard. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di seluruh dunia terutama di negeri ini merupakan kasus yang kompleks dan tidak sederhana. Menurut Waluya, Koordinator Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Koruspgah) Wilayah IV Kedeputian Pencegahan KPK RI, salah satu penyebab tingginya utang luar negeri Indonesia adalah korupsi. Beberapa hal yang menyebabkan orang melakukan korupsi ada tiga. Pertama, secara

terpaksa (*corruption by need*) karena ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak tercukupi oleh gaji yang rendah. Kedua adalah Memaksa (*corruption by greed*) dilakukan karena adanya sifat keserakahan untuk bisa hidup berlebihan (bermewah-mewahan). Terakhir adalah Dipaksa (*corruption by system*) karena pertemuan antara niat dan kesempatan serta kelemahan sistem dan peraturan (<http://www.sergap.id/nilah-tiga-penyebab-kenapa-orang-melakukan-korupsi-menurut-kpk/> diakses pada 16 Oktober 2018).

Infografis penyebab korupsi yang terdapat di laman website milik KPK bahkan menunjukkan faktor-faktor yang lebih spesifik lagi. Dua faktor inti penyebab korupsi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya terdiri dari aspek perilaku individu (sifat rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif) dan aspek sosial (dorongan perilaku keluarga atau lingkungan keluarga). Faktor eksternalnya terdiri dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, diantaranya masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas jika masyarakat ikut terlibat aktif dalam pencegahan dan pemberantasan. Aspek kedua yaitu aspek ekonomi (pendapatan tidak cukup). Aspek ketiga yaitu aspek politis (kepentingan politis berupa meraih dan mempertahankan kekuasaan). Aspek keempat yaitu aspek organisasi, diantaranya kurang adanya keteladanan pimpinan, tidak ada kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya

pengawasan (<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/penyebab-korupsi> diakses pada 16 Oktober 2018).

Peneliti telah melakukan wawancara (*pre-eliminary*) dengan salah satu narapidana korupsi di Lapas Wirogunan yang bernama PR. PR merupakan seorang pensiunan PNS dan pernah menjabat sebagai kepala kantor salah satu lembaga di daerah. Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa PR merasa bahwa korupsi-korupsi yang terjadi di daerah rata-rata tidak dalam bentuk mengambil uang negara. PR merasa sekalipun mendapat uang, itu hanya sebagai honor. PR merasa bahwa adanya kebijakan baru justru membuat kejaksaan yang selalu dikejar-kejar dan harus benar-benar menghabiskan anggaran, sehingga PR merasa orang-orang seperti dirinya yang harus dikorbankan. PR merasa bahwa korupsi yang terjadi di ruang lingkup pemerintahan pusat memang jelas korupsi yang dilakukan adalah sengaja, tetapi PR merasa bahwa orang-orang seperti dirinya yang berada di daerah hanya menjadi korban.

*“Kalau korupsi yang di daerah ini mbak bisa percaya rata-rata tidak ngambil uang. Kalau pun ngambil itu hanya sebagai honor. Tapi karena kebijakan baru dari prasekjen luar biasa jadi pokoknya yang penting ngabisin anggaran kan sekarang di kejaksaan itu. Ah itu yang dikejar ngabisin anggaran itu. Tapi kita dikorbankan luar biasa. Yang di daerah yang saya kejar. Kalau yang di pusat itu jelas itu yang ngambil bermilyat-milyat lha kita itu cuma dikorbankan (pre-eliminary/ wawancara awal/ PR)”.*

PR merasa bahwa permasalahan korupsi yang terjadi di daerah rata-rata hanya ditarget. PR merasa bahwa orang-orang di daerah tidak ada yang sengaja mengambil uang negara. PR mencantohkan ada kasus dimana orang dianggap korupsi merugikan negara sebesar dua

belas setengah juta tetapi sudah harus dipenjara satu setengah tahun. PR merasa bahwa orang-orang yang sudah menjadi target KPK memang mengambil uang negara dalam jumlah yang banyak, tetapi PR merasa bahwa dirinya hanya melakukan kesalahan administrasi sehingga sudah dapat dipenjara. PR merasa tidak mengambil uang sedikitpun, tetapi karyawan bawahannya di kantor sering melakukan pungutan terhadap masyarakat di luar sehingga dirinya yang harus bertanggung jawab sebagai kepala kantor. PR merasa ada lima orang karyawan bawahannya yang mengaku bahwa melakukan pungutan atas perintah PR. PR merasa tidak terima sebenarnya.

*“Ah cuman kalau masalah korupsi di daerah rata-rata hanya ditarget. Sebenarnya ndak ada orang itu mengambil uang itu ndak ada. Ada dua belas setengah juta masa dipenjara satu setengah tahun. Logikanya kan namanya korupsi kan kalau seperti yang di KPK memang banyak ya. Kalau saya hanya kesalahan administrasi bisa dipenjara. Saya juga nggak ngambil tapi karena anak buah pungut-pungut di luar saya harus bertanggung jawab. Ada lima orang disuruh saya katanya. Habis lah saya saya ndak terima (pre-eliminary/ wawancara awal/ PR)”.*

PR juga mencontohkan bahwa ada orang yang menggunakan uang untuk membangun lapangan bola tetapi dianggap melakukan korupsi, padahal PR merasa seharusnya tidak ada korupsinya sama sekali.

*“Ooh bukan ndak ada korupsinya juga itu hanya menggunakan uang aja dianggap korupsi untuk mbangun lapangan bola (pre-eliminary/ wawancara awal/ PR)”.*

PR merasa pada awalnya dirinya tidak mengetahui apa-apa. PR merasa bahwa dirinya diproses sampai dianggap melakukan korupsi agar jaksa semakin kuat dan dapat menyelesaikan kejadian/ permasalahan yang sudah dituntut masyarakat terhadap kantornya. PR merasa kemudian dikait-kaitkan dengan pungli. PR mengakui bahwa memang ada staf-stafnya yang melakukan pungli sampai menjadi kaya, namun PR yang dituduh sebagai seseorang yang memerintahkan itu semua. PR merasa bahwa dirinya dianggap melakukan inisiatif pungli. PR yang pada akhirnya harus bertanggung jawab.

*“Nggak tahu apa-apa saya. Jadi kira-kira kejadian terus supaya jaksa kuat yaudah saya diproses bahwa ada korupsi disitu kenapa nggak selesai kira-kita begitu. Lalu dikaitkan dengan pungli. Lha staf saya ada yang pungli. Ada yang 800 juta ada yang bikin rumah beli mobil sudah kaya semua itu. Tapi seolah saya yang suruh. Lalu saya ndak ada tanda terima itu. Tapi kan dianggap saya yang punya inisiatif. Bertanggung jawablah kira-kira (pre-eliminary/ wawancara awal/ PR)”.*

Peneliti juga melakukan wawancara (*pre-eliminary*) dengan salah satu narapidana korupsi di Lapas Wirogunan yang bernama WA. WA pernah berprofesi sebagai karyawan di sebuah perguruan tinggi dan pernah menjadi pelatih sekaligus pengurus klub olahraga. WA merasa bahwa penggunaan uang negara harus benar-benar sesuai dengan pengajuan anggaran negara sejak awal. WA mencontohkan bahwa jika dirinya mengajukan uang seratus ribu, maka dirinya harus membeli buku seribu, makan, dan sebagainya harus benar-benar sesuai semua sesuai pengajuan anggaran negara sejak awal. Jika uang seribu itu ternyata justru digunakan untuk membeli pensil saja, maka sudah salah dan harus mengembalikan uang tersebut.

*“Iya harus sesuai jadi kalau kita menggunakan uang negara itu kan harus sesuai. Misalnya saya mengajukan uang seratus ribu. Ya seribu untuk beli buku seribu untuk makan itu harus sesuai semua. Jadi kalau misalnya seribu untuk saya belikan pensil itu aja salah. Harus mengembalikan (pre-eliminary/ wawancara awal/ WA)”.*

WA merasa bahwa sebenarnya tidak memahami bagaimana korupsi itu. WA hanya mengetahui bahwa korupsi itu selalu dalam bentuk mengambil uang, sedangkan dirinya merasa tidak mengambil uang sama sekali. WA merasa bahwa dirinya justru harus menambahi kekurangan dari anggaran yang sudah ada. WA hanya diberi dana dari pemerintah kota X sebesar 650 juta, tetapi biaya untuk acaranya adalah satu setengah miliar. WA merasa bahwa dirinya justru harus berusaha keras mencari bantuan karena kekurangan biaya tersebut.

*“Ya kita itu kan aslinya nggak ngerti korupsi itu gimana. Korupsi kan tahunya kita ngambil duit. Lha kita itu nggak ngambil lho. Itu bener. Kita itu nombok. Dananya dari pemerintah itu kan cuma 650 juta. Dan untuk biaya acara itu satu setengah miliar kita harus pontang-panting nyari bantuan kesana kemari (pre-eliminary/ wawancara awal/ (WA)”.*

WA pada awalnya hanya mengetahui bahwa yang dinamakan korupsi adalah ketika WA diberi uang satu juta tetapi yang digunakan hanya tujuh ratus ribu. WA merasa bahwa pada kasusnya justru dirinya dan rekan-rekannya hanya diberi anggaran sekian dan masih harus mencari kekurangannya yang sangat banyak sekian. WA baru mengetahui bahwa ternyata jika penggunaan uangnya tidak sesuai pengajuan awalnya juga sudah dapat dinamakan korupsi.

*“Tahu kita itu yang namanya korupsi itu misalnya saya dikasih uang satu juta tapi cuma saya gunakan tujuh ratus lha itu korupsi. Lha kita kan dikasih enam ratus kita harus nyari satu setengah. Ternyata ya itu yang namanya korupsi itu kalau ndak sesuai peruntungannya juga dinamakan korupsi (pre-eliminary/ wawancara awal/ WA)”.*

WA merasa bahwa dirinya dan rekan-rekannya pengurus klub olahraga sudah dianggap harus tahu segalanya termasuk aturan keuangan. WA padahal merasa bahwa yang menjadi pengurus olahraga itu biasanya merupakan volunteer. WA merasa bahwa untuk mencari pengurus saja sudah susah. WA merasa bahwa ketika ada masalah dirinya dan rekan-rekannya selaku pengurus klub olahraga dianggap sebagai kepala dinas yang harus mengetahui segalanya, padahal tidak mendapat gaji.

*“Lha kita itu pengurus gitu dianggep seperti kepala dinas harus sudah tahu apa tahu segala aturan keuangan. Padahal kita itu untuk nyari ketua apa pengurus olahraga itu kan volunteer ya. Jadi sukarela kan kita nyari pengurus aja kadang-kadang susah. Tapi kalau ada masalah kita dianggep seperti kepala dinas harus tahu segalanya. Padahal kita ya tidak digaji (pre-eliminary/ wawancara awal/ WA)”.*

Berdasarkan hasil *pre-eliminary*. dapat disimpulkan bahwa terdapat narapidana korupsi yang tetap merasa menjadi korban. Pelaku korupsi bisa saja pernah berteriak anti korupsi, namun lingkungan baru yang sebenarnya yang dapat mempengaruhi mereka seperti fakta-fakta yang telah disebutkan oleh KPK. Pelaku korupsi biasanya dalam prosesnya harus dihadapkan pada berbagai situasi eksternal tertentu sehingga mereka harus memutuskan sesuatu. Faktor eksternal di sisi lain tidak akan kuat mempengaruhi perilaku seseorang tanpa adanya

pengaruh internal. Pelaku korupsi banyak yang sebenarnya memutuskan sesuatu dalam kondisi tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya ternyata salah dan melanggar aturan. Pelaku korupsi banyak yang kurang mendapat pemahaman bahwa korupsi tidak hanya dapat didefinisikan sebagai mengambil uang negara, sehingga ketika melakukan pengambilan keputusan berkaitan dengan kewenangan profesinya menjadi kurang hati-hati. Pelaku korupsi banyak yang tidak mengira bahwa proses yang sudah dilewati sejak awal dengan berbagai dinamika pengambilan keputusan ternyata dapat membuat mereka menjadi pelaku korupsi. Pengambilan keputusan korupsi bisa jadi merupakan proses yang sulit dan panjang bagi para pelaku korupsi.

Menurut Jeremy Pope (2000) dalam bukunya Strategi memberantas korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International Indonesia, definisi korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun, korupsi dapat juga dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak. Itu artinya, dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah itu dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik harus menghindarkan diri dari hubungan pribadi atau kedekatan keluarga. Korupsi akan timbul jika prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga (<https://antikorupsi.org/id/news/tingkat-toleransi-terhadap-korupsi> diakses pada 2 Agustus 2019).

Pengambilan keputusan adalah proses memilih salah satu alternatif terbaik di antara sekian banyak alternatif yang ada yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah (Raihan, 2016). Pengambilan keputusan adalah perumusan alternatif tindakan sesuai

dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat setelah evaluasi mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambil keputusan (Supranto, 2009). Proses pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif pemecahan masalah guna mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Proses ini memang lebih panjang dan memakan waktu jika dinalar, namun kemungkinan kesalahannya dapat diperkecil. Proses pengambilan keputusan terdiri dari berbagai tindakan yang memanfaatkan berbagai ragam keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan berorganisasi. Pengambilan keputusan bukan suatu hal yang mudah. Setiap keputusan mengandung risiko yang harus dihadapi ke depannya terutama oleh pengambil keputusan (Anwar, 2014).

Pengambilan keputusan korupsi tentunya sudah dilakukan oleh pelaku korupsi dengan tahapan atau proses yang berbeda-beda. Pelaku korupsi terdiri dari narapidana korupsi dan mantan narapidana korupsi. Mantan narapidana korupsi memiliki kemungkinan telah menjadi lebih baik dan ingatan atau memorinya berkurang mengenai pengalamannya sebelum memutuskan korupsi karena telah lama bebas dari hukuman. Narapidana korupsi di sisi lain lebih memiliki ingatan yang pasti dan matang mengenai pengalamannya sebelum memutuskan korupsi karena mereka masih menjalani hukuman dan memaknai kesalahannya. Narapidana korupsi sebelum memutuskan untuk korupsi biasanya mengetahui apa saja konsekuensi yang harus didapatkan atas perbuatannya. Konsekuensi-konsekuensi seperti itu bisa jadi menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan pelaku korupsi sebelum mereka benar-benar melakukan korupsi. Pelaku korupsi mungkin saja

menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah. Setelah melalui suatu proses, mereka tetap melakukan hal tersebut karena berbagai faktor. Pelaku korupsi tentunya memiliki pengalaman, informasi, pengetahuan, maupun situasi tersendiri sampai memutuskan untuk korupsi. Pelaku korupsi melalui proses yang berbeda-beda, baik itu proses yang singkat maupun proses yang panjang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KORUPSI: Studi Fenomenologi Pada Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengambilan keputusan korupsi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan korupsi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritik dalam penelitian ini adalah dapat menjadi masukan bagi para ilmuwan psikologi khususnya bidang psikologi forensik mengenai proses pengambilan keputusan pelaku korupsi.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Lembaga-Lembaga Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merancang pembinaan dan pencegahan sejak dini yang tepat terhadap semua aparatur negara/ pemerintahan agar tindak pidana korupsi tidak dapat berkembang pesat secara terus menerus.

#### **b. Penegak Hukum**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar penegak hukum benar-benar melaksanakan sistem peradilan sesuai aturan hukum yang berlaku, memberi pengayoman kepada semua pihak dengan menjunjung atasas keadilan, menumbuhkan kepercayaan yang nyata terhadap semua pihak, dan semakin gencar dalam melakukan sosialisasi terutama mengenai sinkronisasi antara mekanisme kerja jabatan tertentu dengan mekanisme hukum yang berlaku.

#### **c. Masyarakat Umum**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai proses pengambilan keputusan pelaku korupsi.

Setelah masyarakat mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan korupsi secara rinci, diharapkan masyarakat akan lebih waspada, berhati-hati, peduli, dan ikut serta mengontrol kinerja pejabat publik atau siapapun yang berpeluang untuk dapat melakukan korupsi. Masyarakat juga diharapkan untuk menjauhi perilaku gratifikasi kapanpun dan dimanapun. Sehingga kasus korupsi dapat berkurang dan tidak semakin berkembang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai pengambilan keputusan sudah banyak yang meneliti. Akan tetapi sepengetahuan penulis, penelitian mengenai proses pengambilan keputusan korupsi khususnya pada narapidana korupsi belum pernah dilakukan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Permana Putra (2013) yang berjudul “Hubungan Antara Tipe Kepribadian Dengan Problem Solving Appraisal dan Cognitive Appraisal pada Narapidana Korupsi: Studi Korelasi Di Lapas Sukamiskin Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tipe kepribadian dan problem solving appraisal pada narapidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penggunaan kuesioner. Penelitian ini melibatkan subjek narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian

dengan *problem solving appraisal*, dan tidak terjadi pengaruh *cognitive appraisal* pada narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Setyoashih DP, Karyono, dan Endang Sri Indrawati (2010) yang berjudul “Pengambilan Keputusan Membunuh Suami Pada Narapidana Di Lapas Wanita II-A Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pengambilan keputusan istri yang telah membunuh suami, pola coping pengambilan keputusan, dan faktor-faktor yang memengaruhi proses untuk mengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini melibatkan tiga subjek utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan membunuh suami yang dilakukan oleh subjek penelitian meliputi beberapa tahap dan tahap-tahap tersebut berbeda pada setiap subjek.

Penelitian yang dilakukan Puguh Adi Wibowo (2015) berjudul “Hubungan Aspirasi Edukasi Orang Tua dengan Proses Pengambilan Keputusan Karier Siswa di SMA 36 Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aspirasi edukasi orang tua dengan proses pengambilan keputusan karier siswa di SMA 36 Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan teknik random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara aspirasi edukasi orang tua dengan pengambilan keputusan karier.

Penelitian yang dilakukan Yohana S Rini (2014) berjudul “Komunikasi Orang Tua-Anak dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman orang tua-anak dalam berdialog untuk mengambil

keputusan mengenai jurusan pendidikan. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterlibatan orangtua dan anak dalam pengambilan keputusan memilih jurusan pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadiatus Salama (2014) yang berjudul “Motif dan Proses Psikologis Korupsi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan fenomena psikologi korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara. Penelitian ini melibatkan dua subjek mantan narapidana korupsi di Surakarta, Jawa Tengah. Data penelitian menghasilkan lima tema, yaitu definisi korupsi, motif melakukan korupsi, proses terjadinya korupsi, dampak terhadap pelaku korupsi, dan cara coping akibat korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Melynda Narawika Rengganis (2017) yang berjudul “Pencapaian Generativitas Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dewasa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencapaian generativitas mantan narapidana tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini melibatkan tiga subjek yang pernah menjalani masa hukuman karena kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mantan narapidana dapat mencapai generativitas mereka dan memaknai generativitas sebagai usaha untuk aktualisasi agar dapat menularkan ilmu atau

pengalaman subjek ke orang lain dan kebutuhan penerimaan diri. Generativitas dapat dicapai dari dukungan orang-orang sekitar subjek.

Penelitian yang dilakukan oleh Raihanal Miski dan Marty Mawarpury (2017) yang berjudul “Proses Pengambilan Keputusan Pada Remaja yang Mengalami Pengasuhan Otoriter”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pengambilan keputusan remaja yang mengalami pengasuhan otoriter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara. Penelitian ini melibatkan subjek remaja yang berusia 17 tahun dan berdomisili di Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengasuhan otoriter terhadap pengambilan keputusan subjek.

Penelitian yang dilakukan oleh Herson Anwar (2014) yang berjudul “Proses Pengambilan Keputusan untuk Mengembangkan Mutu Madrasah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran proses pengambilan keputusan kepala madrasah di MAN Model Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis uji kecenderungan dengan teknik *Weighted Means Score* (WMS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan masalah, proses penentuan kriteria pemecahan masalah, pengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, proses penilaian terhadap alternatif pemecahan masalah, proses pemilihan alternatif yang terbaik, dan proses penetapan atau pengimplementasian alternatif yang dipilih dalam pengambilan keputusan kepala madrasah di MAN Model Gorontalo berada dalam kategori baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Moordiningsih dan Faturochman (2006) yang berjudul “Proses Pengambilan Keputusan

Dokter”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dinamika psikologis pengambilan keputusan individu, dokter hingga sampai pada sebuah keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini melibatkan sebelas dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit Dr. Moewardi, Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perjalanan individu untuk sampai pada satu keputusan melalui beberapa tahapan dan terdapat beberapa model pengambilan keputusan dalam bidang kedokteran.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rizki Meilani, Suwarti, dan Dyah Astorini Wulandari (2018) yang berjudul “Studi Kasus Tentang Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Lesbi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan menjadi lesbian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini melibatkan lesbian yang pernah memiliki hubungan dengan sesama jenis di Purwokerto Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan seorang lesbi menjadi lesbian dan adanya faktor biologik, psikososial dan psikologik pada kehidupan informan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Listyo Yuwanto (2015) yang berjudul “Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan *Basic Human Values*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil psikologi koruptor berdasarkan tinjauan *basic human values*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini melibatkan 52 psikolog yang memberikan penilaian terhadap koruptor berdasarkan instrumen European Social Survey

(ESS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima tipe koruptor berdasarkan tinjauan *basic human values*.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa Proses pengambilan keputusan korupsi berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu:

1. Tema atau judul penelitian dimana penelitian ini melihat bagaimana proses pengambilan keputusan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas pengambilan keputusan dokter, karier, pendidikan, remaja yang mengalami pengasuhan otoriter, menjadi lesbi, dan membunuh suami. Persamaan keduanya adalah membahas pengambilan keputusan.
2. Subjek penelitian ini adalah Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dan belum pernah dijadikan subjek penelitian dengan tema yang sama yaitu pengambilan keputusan.
3. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan metode kuantitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif juga ada, tetapi pendekatan yang digunakan adalah studi kasus.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan penelitian dilapangan, maka hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kelima informan sebelum menjadi narapidana korupsi merupakan orang-orang berkedudukan tinggi, pintar, dan memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi.
2. Proses pengambilan keputusan korupsi melalui enam tahapan yaitu identifikasi dan definisi masalah, mengembangkan alternatif pemecahan, evaluasi alternatif pemecahan, memilih alternatif, implementasi keputusan, serta evaluasi dan pengendalian. Kelima informan sering berpikir kritis dan mempertimbangkan segala hal sebelum mengambil keputusan pada saat dihadapkan dengan berbagai situasi dalam semua tahapan proses pengambilan keputusan. Kelima informan tidak mengambil keputusan dengan sepihak tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan orang lain yang memiliki kepentingan yang berkaitan. Kelima informan pada awalnya tidak memperkirakan sama sekali bahwa tahapan-tahapan yang sudah dilewati sejak awal dengan berbagai dinamika pengambilan keputusan yang sudah dipertimbangkan dengan matang pun pada akhirnya tetap dapat membuat mereka masuk ke dalam lingkaran korupsi.
3. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan korupsi diantaranya yang pertama adalah budaya gratifikasi. Semua informan tinggal di lingkungan yang masih memiliki

budaya gratifikasi yang marak sehingga menganggap perilaku gratifikasi/ memberi dan menerima merupakan suatu hal yang biasa. Faktor selanjutnya adalah pemahaman aturan hukum yang kurang. Informan yang memiliki latar belakang profesi kepala desa merasa masih kurang memahami aturan hukum sehingga menjadi narapidana korupsi. Informan kurang mendapat pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang aturan hukum berkaitan dengan mekanisme kerjanya sehingga baru mengetahui jika apa yang dilakukannya ternyata salah setelah di pengadilan. Faktor selanjutnya adalah persaingan politik atau bisnis. Beberapa informan merasa dilaporkan dan terkena kasus korupsi karena adanya pesaing dalam hal politik maupun bisnis. Informan merasa sengaja dikriminalisasi oleh lawan/ pihak berkepentingan yang tidak menyukai kehadiran informan. Faktor selanjutnya adalah implementasi sistem yang masih kurang baik. Faktor terakhir adalah ketidakpercayaan terhadap hukum. Kelima informan tidak mempercayai hukum termasuk kinerja penegak hukum. Kelima informan menjadi memiliki dendam dan kebencian tertentu terhadap penegak hukum yang pernah mengadili kasus mereka. Kelima informan menganggap dirinya akhirnya menjadi narapidana korupsi karena selera penegak hukum dan merasa penegak hukum memiliki kepentingan tertentu. Kelima informan merasa adil tidaknya maupun lama vonis pidananya bergantung kepada uang yang diberikan kepada penegak hukum. Kelima informan merasa didzalimi karena tidak mendapat ketidakadilan dan merasa menjadi target hukum.

4. Kelima informan tidak menyukai korupsi karena membahayakan sehingga merasa sudah menjadi musuh negara.
5. Kelima informan secara keseluruhan tidak memiliki rasa bersalah pasca korupsi. Kelima informan pada umumnya tetap merasa dirinya tidak pernah korupsi walaupun telah menjadi narapidana korupsi. Satu informan yang merasa bersalah pun karena sudah menjadi pelaku korupsi tetap merasa tidak terima jika dituduh memperkaya diri.

### **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar penegak hukum lebih gencar meyakinkan masyarakat sehingga dapat mempercayai hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar penegak hukum melaksanakan sistem peradilan sesuai aturan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian maupun pengayoman kepada semua pihak tanpa pandang bulu. Penegak hukum supaya benar-benar menjunjung asa keadilan, bersih, dan tidak menerima intervensi dari pihak manapun. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar lembaga hukum dapat menjadi tempat masyarakat mencari keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar penegak hukum supaya tidak melakukan gratifikasi dalam

bentuk apapun. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar penegak hukum memutuskan hukuman tanpa kepentingan pribadi apapun termasuk dalam hal menaikkan karir semata. Narapidana korupsi dijerat karena kasus korupsi yang kasusnya sudah berkaitan dengan uang kerugian negara. Lebih miris lagi jika narapidana korupsi justru diadili oleh penegak hukum yang juga terjebak dalam permainan hukum di belakang sehingga keputusan hukumannya dapat diintervensi walaupun tidak sesuai dengan fakta persidangan. Ibarat lap kotor jika dibersihkan dengan lap kotor juga maka akan sia-sia. Korupsi tidak akan ada habisnya jika pihak yang ditugaskan untuk menghukum supaya pelaku korupsi jera justru ternyata sama-sama tidak memiliki sistem maupun SDM yang kuat untuk melawan perilaku korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar penegak hukum benar-benar menegakkan hukum yang mengayomi semua pihak terutama kaitan dengan kasus korupsi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar pihak pemerintah yang tergabung dalam lembaga apapun supaya melakukan perbaikan sistem/ peraturan yang masih buruk terutama dalam hal implementasinya secara terus menerus. Implementasi sistem diharapkan peneliti supaya menjadi lebih baik lagi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar implementasi sistem pemerintahan menjadi tidak lagi membingungkan, bertabrakan, dan sebagainya seperti yang sudah disebutkan oleh informan dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan agar dengan adanya perbaikan sistem secara berkala maka perilaku korupsi dapat dicegah sejak dini karena karena implementasi sistem/ peraturan pemerintah yang ada sudah sangat kuat.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar semua pihak yang memiliki profesi-profesi apapun dari jabatan terendah sampai jabatan tertinggi, baik itu PNS, karyawan biasa/perangkat desa, kepala pemerintahan dari lingkup terkecil desa, wiraswasta, karyawan, dan sebagainya agar lebih berhati-hati dalam menjalankan profesi masing-masing. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar semua orang yang memiliki profesi apapun lebih amanah dalam menjalankan pekerjaan, tidak mencari celah dengan masih adanya sistem yang lemah, tidak memanfaatkan jabatan untuk dijadikan ladang pemasukan yang tidak halal diluar gaji pokok, tidak memanfaatkan suap/pemberian sebagai patokan dalam kualitas pelayanan terhadap orang lain, tidak mudah melakukan segala cara termasuk menyuap untuk kepentingan perbaikan karir, dan benar-benar menjalankan mekanisme pekerjaan sesuai aturan hukum yang ada.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar masyarakat yang berkaitan langsung dengan pihak lembaga apapun baik itu pemerintah maupun swasta supaya tidak membiarkan budaya gratifikasi yang ada. Selama ini banyak pihak yang membiarkan merebaknya bida Gratifikasi bahkan di kalangan masyarakat sekalipun. Masih banyak

masyarakat yang menganggap budaya gratifikasi itu sudah biasa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar agar masyarakat menghindar maupun melawan dari perilaku korupsi sekecil apapun termasuk gratifikasi yang dapat dimulai dari diri sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar masyarakat semakin rajin untuk mencari tahu apa itu gratifikasi, bagaimana bentuk-bentuk perilaku gratifikasi secara lebih spesifik, sehingga masyarakat dapat mengingatkan, memberikan pemahaman bahwa yang dilakukan itu salah, dan melaporkan ke pihak yang berwenang.

5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar pihak-pihak yang berkaitan di lembaga tertentu atau pihak pelayanan hukum yang bertugas untuk memberikan pemahaman semakin gencar dalam memberikan pemahaman terkait mekanisme kerja dalam profesi-profesi tertentu, sinkronisasinya dengan aturan hukum yang berlaku, serta apa yang boleh dilakukan maupun apa yang tidak boleh dilakukan dalam jabatan tertentu. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan korupsi karena ketidakpahaman terhadap aturan/ sistem/ SOP yang berlaku.
6. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar semua pihak yang terjun dalam dunia politik maupun bisnis dan memiliki pesaing atau lawan supaya lebih berhati-hati, bersaing dengan sehat, dan tidak mudah mengkriminalisasi seseorang yang akan menghancurkan

pekerjaan, masa depan, keluarga, serta kehidupan sosial pesaing masing-masing

7. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar keluarga, teman-teman satu kantor, maupun masyarakat di lingkungan sekitar dapat menjadi support system terbesar dengan menjadi tempat keluh kesah apapun jika terjadi masalah di tempat kerja supaya seseorang mendapat masukan positif dari banyak pihak dan memiliki pandangan yang lebih objektif dan luas. Sehingga seseorang dapat terhindar dari perilaku korupsi.
8. Peneliti menyadari bahwa didalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, karena mungkin masih banyak data yang perlu diungkap secara lebih mendalam. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penggalian data lebih mendalam terkait proses pengambilan keputusan korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., & Siswadi, A. G. M. (2015). *Psikologi Korupsi: Memahami Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Korupsi, Pola-Pola Perilaku Korupsi, dan Pola-Pola Penanganan Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Amalia, R. R. (2017). Rasa Bersalah (*Guilty Feeling*) pada Siswi Sekolah Religi Tingkat Menengah Atas yang Melakukan Perilaku Seksual Pranikah di Kecamatan Tenggarong. *Jurnal Psikoborneo*, 5(4), 719-734.

Amirullah., & Budiyono, H. (2004). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Anwar, H. (2014). Proses Pengambilan Keputusan untuk Meningkatkan Mutu Madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam Nadwa*, 8(1), 37-56.

Ardana, K., Mujiati, N. W., & Sriathi, A. A. A. (2009). *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Baumeister, R. F., Vohs, K. D., DeWall, C. N., & Zhang, L. (2007). How Emotion Shapes Behavior: Feedback, Anticipation and Reflection Rather Than Direct Causation. *Journal Personality and Social Psychology Review*, 11(2), 167-203.

Cohen, *et. al.* (2011). Introducing The GASP Scale: A New Measure of Guilt and Shame Proneness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 100(5), 947-966.

Fahmi, I. (2014). *Perilaku Organisasi (Teori, Aplikasi, dan Kasus)*. Bandung: Alfabeta.

Daft, R. L. (2010). *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

Djaja, E. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika.

Falah, F. (2014). Kita Nggak Bisa Apa-Apa... (Studi Mengenai Adaptasi Individu terhadap Budaya Korupsi di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah X. *Jurnal Psikologi Integratif*, 2(2), 18-26.

Fitri, R. A. (2015). Sumber dan Cara Mengatasi Rasa Bersalah pada Wanita Perokok yang Memiliki Anak Balita. *Jurnal Humaniora*, 6(1), 11-20.

Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Haboddin, M., & Rahman, F. (2013). *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Kaukaba.

Hamzah, J. A. (2005). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardoko, E. (2018, Februari). Indeks Persepsi Korupsi 2017: Peringkat Indonesia di Bawah Timor Leste. *KOMPAS*. Diunduh dari: <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/26/14444501/indeks-persepsi-korupsi-2017-peringkat-indonesia-di-bawah-timor-leste> tanggal 10 Oktober 2018.

Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *Jurnal at-Taqaddum*, 8(1), 21-46.

Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Inilah Tiga Penyebab Kenapa Orang Melakukan Korupsi Menurut KPK. (2017, November). *SERGAP*. Diunduh dari: <http://www.sergap.id/inilah-tiga-penyebab-kenapa-orang-melakukan-korupsi-menurut-kpk/> tanggal 16 Oktober 2018.

Jailani, M. S. (2013). Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory,dan Studi Kasus). *Jurnal Edu-Bio*, 4, 41-50.

Luthans, F. (2006). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi.

Meilani, E. R., Suwarti., & Wulandari, D. A. (2018). Studi Kasus Tentang Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Lesbi. *Jurnal Psycho Idea*, 16(1), 75-87.

Miski, R., & Mawarpuri, M. (2017). Pengambilan Keputusan Pada Remaja Yang Mengalami Pengasuhan Otoriter. *Jurnal Ecopsy*, 4(3), 157-162.

Moordiningsih., & Faturochman. (2006). Proses Pengambilan Keputusan Dokter. *Jurnal Psikologi*, 33(2), 1-15. doi: 10.22146/jpsi.7077.

Nurhayani. (2016). Emosi Malu (*Shame*) dan Rasa Bersalah (*Guilt*) dalam Pembelajaran Moral Anak Usia Dini. *Jurnal Raudhah*, 4(2).

Penyebab Korupsi. *KPK ACLC*. Diunduh dari: <https://aclc.kpk.go.id/> tanggal 16 Oktober 2018.

Poetri, A. A. D. (2013). Makna Mengajar (Studi Fenomenologi Pada Pengajar Dalam Komunitas Save Street Child Surabaya). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, 1-17.

Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Putra, A. P. (2013). Hubungan Antara Tipe Kepribadian Dengan Problem Solving Appraisal dan Cognitive Appraisal pada Narapidana Korupsi. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Diunduh dari: <http://repository.unair.ac.id/> tanggal 9 Oktober 2018.

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.

Raihan. (2016). Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan Manajemen Dakwah. *Jurnal Al-Bayan* 22(34), 65-78.

Rengganis, M. N. (2017). Pencapaian Generativitas Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dewasa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang. Diunduh dari: <http://karya-ilmiah.um.ac.id/> tanggal 9 Oktober 2018.

Rezki, A. D. (2017). Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 1-31.

Rini, Yohana S. (2014). Komunikasi Orang Tua-Anak dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan. *Jurnal Interaksi*, 3(2), 112-122.

Ritonga, C. (2005, 24 Juni). Tingkat Toleransi Terhadap Korupsi. Diunduh dari <https://antikorupsi.org/id/news/tingkat-toleransi-terhadap-korupsi> tanggal 2 Agustus 2019.

Rukmana, H. G. (2014). Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Diunduh dari: <http://digilib.uin-suka.ac.id/> tanggal 3 Oktober 2018.

Salama, N. (2014). Motif dan Proses Psikologis Korupsi. *Jurnal Psikologi*, 41(2), 149-164.

Sarwono, S. W., dkk. (2015). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Setiawan, S. R. D. (2018, Mei). Hingga 2017, Terdakwa Korupsi Didominasi Pegawai Pemda. *KOMPAS*. Diunduh dari: <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/15133911/hingga-2017-terdakwa-korupsi-didominasi-pegawai-pemda> tanggal 10 Oktober 2018.

Setyoashih DP, B., Karyono., & Indrawati, E. S. (2010). Pengambilan Keputusan Membunuh Suami Pada Narapidana Di Lapas Wanita II-A Malang. *Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro*, 1-20.

Soegijono. (1993). Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data. *Jurnal Media Litbangkes*, 3(1), 17-21.

Sugiyono. (2013). *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supranto, J. (2009). *Teknik Pengambilan Keputusan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tangney, J. P. (2005). The Self-Conscious Emotions: Shame, Guilt, Embarrassment and Pride. *Handbook of Cognition and Emotion*, 541-568.

Toha, M., & Darmanto. (2013). *Perilaku Organisasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Tuapattinaya, Y. I. F., & Hartati, S. (2014). Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Beda Etnis: Studi Fenomenologis Pada Perempuan. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(1), 34-41.

Utami, R. R., & Asih, M. K. (2016). Konsep Diri dan Rasa Bersalah pada Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo. *Jurnal Indigenous*, 1(1), 84-91.

Wibowo, P. A. (2015). Hubungan Aspirasi Edukasi Orang Tua dengan Proses Pengambilan Keputusan Karier Siswa di SMA 36 Jakarta. *Jurnal Insight*, 4(1), 1-15.

Wirawan. (2013). *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi Dan Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Xu, H., Begue, L., & Shankland, R. (2011). Guilt and Guiltlessness, an Integrative Review. *Journal Social and Personality Psychology*, 5(7), 440-457.

Yanuarti, Ria. (2018). Pengaruh Disparitas Pidana Terhadap Proses Pembinaan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Diunduh dari <https://dspace.uii.ac.id/> tanggal 4 November 2018.

Yuwanto, L. (2018). Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values. *Jurnal Integritas*, 1(1), 1-13.